



**“Tema: 3 (pangan, gizi dan kesehatan)”**

## **PARTISIPASI KONSUMSI SEBAGAI INDIKATOR KONSUMSI PANGAN HEWANI DI DAERAH RENDAH KONSUMSI IKAN**

Oleh

**Freshty Yulia Arthatiani<sup>1</sup> dan Tenny Apriliani<sup>1</sup>**

**<sup>1</sup>Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan**

**freshty.arthatiani@gmail.com**

### **ABSTRAK**

Indonesia merupakan wilayah dengan potensi sumberdaya perikanan yang melimpah akan tetapi di beberapa daerah konsumsi ikannya masih rendah. Pangan hewani termasuk didalamnya ikan dan produk peternakan sangat penting sebagai sumber gizi untuk menciptakan sumber pangan berkualitas. Pengukuran konsumsi pangan hewani dapat dilakukan dengan menghitung tingkat partisipasi konsumsi sehingga dapat menunjukkan berapa besar konsumen untuk jenis komoditas tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung tingkat partisipasi konsumsi pangan hewani yang terdiri dari ikan, daging, telur dan susu pada daerah rendah konsumsi ikan yakni Tabanan, Gunungkidul, Sumba Barat Daya dan Sintang. Sumber data yang digunakan adalah data SUSENAS tahun 2017 dengan jumlah responden sebanyak 2.548 rumah tangga yang dianalisis secara deskriptif melalui besaran tingkat partisipasi konsumsinya untuk kelompok pangan hewani ikan, daging, telur dan susu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi konsumsi pangan hewani tertinggi untuk daerah Tabanan dan Gunungkidul adalah telur dengan nilai sebesar 91,25% dan 88,92%, sedangkan untuk Sumba Barat Daya dan Sintang ikan memiliki tingkat partisipasi konsumsi yang tertinggi senilai 72,50% dan 95,24%. Tingkat partisipasi konsumsi ikan terendah ditempati oleh daerah Gunungkidul yang menunjukkan bahwa banyak rumahtangga yang belum mengkonsumsi ikan di daerah ini sedangkan yang tertinggi ditempati oleh Sintang. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Ikan sebagai sumber pangan hewani yang dapat dipenuhi oleh sumberdaya domestik seharusnya masih dapat ditingkatkan partisipasi konsumsinya dengan berbagai program promosi dan edukasi kepada rumah tangga yang belum mengkonsumsi ikan terutama pada daerah Gunungkidul, Sumba Barat Daya dan Tabanan. Peningkatan partisipasi konsumsi terhadap ikan diharapkan dapat menjawab masalah gizi yang dihadapi bangsa sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Indonesia.

Kata kunci: *partisipasi, konsumsi, gizi, pangan hewani*

### **ABSTRACT**

*Indonesia is an area with abundant fishery resource potential but in some areas the consumption of fish is relatively low. Animal food including fish and livestock products is very important as a source of nutrition to create quality food sources. Measurement of animal food consumption can be done by calculating the level of consumption participation so that it can show how many consumers are for certain types of commodities. This study aims to calculate the participation rate of animal food consumption consisting of fish, meat, eggs and milk in low-consumption areas of fish namely Tabanan, Gunungkidul, Sumba Barat Daya dan Sintang. The data source used is SUSENAS data for 2017 with 2.548 respondents analyzed descriptively through the participation rate for the animal food group of fish, meat, eggs and milk. The results showed that the highest participation rate of animal food consumption in the Tabanan and Gunungkidul areas was eggs with values of 91.25%*



and 88.92%, whereas for Southwest Sumba and Sintang fish had the highest participation rates of consumption of 72.50% and 95.24%. The lowest participation rate of fish consumption is occupied by the Gunungkidul area which shows that many households have not consumed fish in this area while the highest is occupied by Sintang. Therefore, it can be concluded that fish as an animal food source that can be fulfilled by domestic resources should still be able to increase its consumption participation through various promotion and education programs for households that have not consumed fish, especially in Gunungkidul, Southwest Sumba and Tabanan areas. Increased participation in consumption of fish is expected to answer the nutritional problems faced by the nation so that it can ultimately improve the quality and competitiveness of Indonesia's human resources.

**Keywords:** participation, consumption, nutrition, animal food.

## **PENDAHULUAN**

Permasalahan gizi di Indonesia masih cukup memprihatinkan yang ditandai dengan Prevalensi *stunting* (anak kerdil) pada balita (bayi di bawah lima tahun) masih tinggi di Indonesia. Menurut hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) yang dilakukan pada tahun 2016, sekitar 29% balita di Indonesia termasuk kategori *stunted*. Balita *stunting* menjadi permasalahan karena berhubungan dengan meningkatnya risiko terjadinya kesakitan dan kematian, perkembangan otak tidak optimal sehingga perkembangan motorik terlambat dan terhambatnya pertumbuhan mental (Mitra 2015). Oleh karena itu penanganan *stunting* menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam sasaran pokok rencana pembangunan jangka menengah tahun 2015-2019. Salah satu upaya penanggulangan *stunting* yang menjadi program pemerintah adalah adanya program peningkatan konsumsi ikan nasional.

Penyebab langsung terjadinya balita *stunting* adalah kurangnya asupan makanan dan terpapar penyakit infeksi (Umeta *et al.* 2003). Wellina *et al.* (2016) mengatakan bahwa faktor risiko yang mempengaruhi kejadian *stunting* diantaranya adalah rendahnya konsumsi energi, protein, seng. Hasil penelitian Sari *et al.* (2016) menunjukkan bahwa asupan protein, kalsium, dan fosfor signifikan lebih rendah pada anak *stunting* dibandingkan pada anak tidak *stunting* usia 24-59 bulan di Kota Pontianak. Oleh karena itu, salah satu upaya untuk menurunkan prevalensi balita pendek adalah meningkatkan konsumsi pangan sumber protein. Menurut Aridiyah *et al.* (2015) tingkat kecukupan protein dan kalsium menunjukkan hubungan yang signifikan untuk mencegah terjadinya *stunting*.

Konsumsi pangan sumber protein berasal dari nabati dan hewani. Protein hewani berasal dari produk peternakan (daging ruminansia, daging unggas, telur dan susu) dan produk perikanan (ikan). Laporan BKP (2018) menggambarkan bahwa ketersediaan protein di Indonesia didominasi oleh protein nabati dengan kisaran 70 gram/hari dibandingkan dengan protein hewani pada kisaran 20 gram/hari. Seperti diketahui bersama bahwa protein hewani sangat penting bagi tumbuh kembang yang optimal menuju kualitas SDM yang unggul. Selain itu penelitian Hariyadi (2015) menyebutkan bahwa konsumsi protein hewani di Indonesia masih tergolong rendah di bawah Thailand, Filipina



dan Malaysia. Penelitian Suryanty dan Reswita (2016) menunjukkan bahwa salah satu permasalahan penting konsumsi pangan Indonesia adalah masih sangat rendahnya kontribusi pangan sumber protein hewani dalam menu makanan sehari-hari.

Salah satu sumber protein dari kelompok pangan hewani adalah ikan yang memiliki kandungan protein sebesar 20-35%, lemak, vitamin A, kalsium dan asam lemak Omega-3 yang bermanfaat untuk pencegahan penyakit degeneratif dan tumbuh kembang otak pada bayi (Murdiati, 2013). Dengan kandungan gizi makro dan mikro yang cukup tinggi ini, ikan mempunyai arti penting dalam menanggulangi berbagai masalah gizi (Khomsan, 2010). Untuk itu, menumbuhkan kebiasaan mengkonsumsi ikan laut bagi masyarakat sangat penting bagi perkembangan pola konsumsi pangan dan pembentukan SDM unggul. Upaya ini dapat diwujudkan karena didukung oleh melimpahnya sumberdaya ikan dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan secara nasional (Ariani *et al.* 2018).

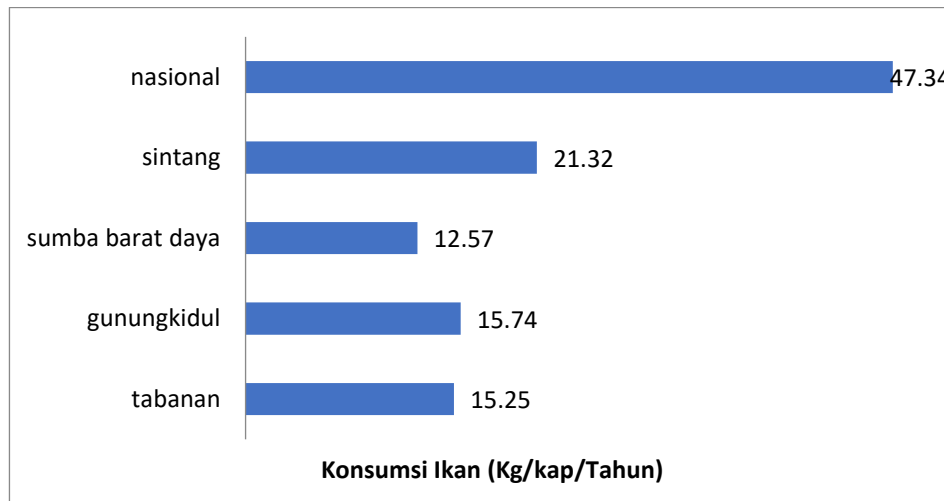
Potensi sumberdaya perikanan dan kekayaan laut yang melimpah sejatinya menempatkan ikan sebagai sumber protein hewani yang dikonsumsi utama dan dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Akan tetapi pada kenyataannya pada beberapa wilayah di Indonesia konsumsi ikannya masih rendah jika dilihat dari angka konsumsi per kapitanya. Ukuran tingkat konsumsi yang digunakan secara global adalah per kapita per tahun, yaitu membagi ketersediaan komoditas tersebut secara nasional dengan total jumlah penduduk di suatu negara. Akan tetapi pada pendekatan ini tidak dapat menggambarkan berapa tingkat konsumsi efektif dilihat dari jumlah rumah tangga yang mengkonsumsi pada suatu cluster tertentu. Menurut Soedjana (2013) ketepatan penggunaan alat ukur konsumsi suatu komoditas dapat menentukan kebijakan terkait pangan yang dilakukan oleh pemerintah karena dapat disesuaikan dengan tingkat partisipasi konsumsi pada suatu wilayah.

Tulisan ini bertujuan untuk mengukur tingkat partisipasi konsumsi pangan hewani pada empat kabupaten yakni Tabanan, Gunungkidul, Sumba Barat Daya dan Sintang yang konsumsi ikannya masih rendah. Data yang digunakan adalah data konsumsi ikan, daging, telur dan susu dari data SUSENAS, BPS tahun 2017 tepatnya pada blok 4.1.C sampai dengan 4.1.E yang dianalisis secara deskriptif meliputi 2.548 rumah tangga. Data yang telah diolah dianalisis secara deskriptif analitik berupa table dan gambar Informasi tingkat partisipasi konsumsi ikan diukur dengan menghitung rumah tangga yang mengkonsumsi ikan terhadap total rumah tangga yang dinyatakan dalam satuan persen (%) Hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi konsumsi pangan hewani pada Kabupaten yang dimaksud sehingga upaya peningkatan konsumsi ikan sebagai program yang dilakukan pemerintah dapat berjalan lebih optimal.

## **METODE PENELITIAN**

### **KONDISI WILAYAH DAN KARAKTERISTIK RUMAH TANGGA**

Penelitian dilakukan pada wilayah rendah konsumsi ikan dalam konteks mendukung kebijakan pemerintah meningkatkan konsumsi ikan nasional untuk mengatasi berbagai masalah gizi yang masih dihadapi oleh penduduk di Indonesia. Data resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2017 menunjukkan bahwa konsumsi ikan di Tabanan, Gunungkidul, Sumba Barat Daya dan Sintang tergolong rendah jika dibandingkan dengan konsumsi ikan nasional yang dijelaskan melalui gambar berikut:



**Gambar 1. Angka Konsumsi Ikan Tahun 2017**  
Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan (2018)

Gambar tersebut diatas menjelaskan bahwa angka konsumsi ikan pada empat Kabupaten yang diteliti jauh lebih rendah dibandingkan konsumsi ikan nasional. Konsumsi ikan terendah dimiliki oleh Kabupaten Sumba Barat Daya sebesar 12,57 kg/kap/tahun sedangkan tertinggi pada Kabupaten Sintang sebesar 21,32 kg/kap/tahun. Akan tetapi jika dibandingkan dengan 13 Kabupaten lainnya pada provinsi Kalimantan Barat maka angka konsumsi ikan pada Kabupaten Sintang adalah paling rendah dan jauh dibawah angka konsumsi ikan rata-rata pada provinsi Kalimantan Barat yang mencapai 31.01 kg/kap/tahun. Oleh karena itu dapat disimpulkan pada keempat Kabupaten yang dipilih sebagai fokus penelitian konsumsi ikan per kapita penduduknya tergolong masih rendah sehingga masih potensial untuk terus ditingkatkan.

Pendapatan merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi tingkat konsumsi termasuk juga konsumsi ikan. Hal tersebut sesuai dengan teori konsumsi Keynesian yang menyatakan bahwa pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh sektor rumah tangga dalam perekonomian tergantung dari besarnya pendapatan. Secara garis besar, kebutuhan konsumsi barang dan jasa oleh rumah tangga dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu kebutuhan pangan dan non pangan. Rata-rata pengeluaran rumah tangga responden susenas secara nasional dan pada lokasi penelitian ditunjukkan dalam Tabel berikut:

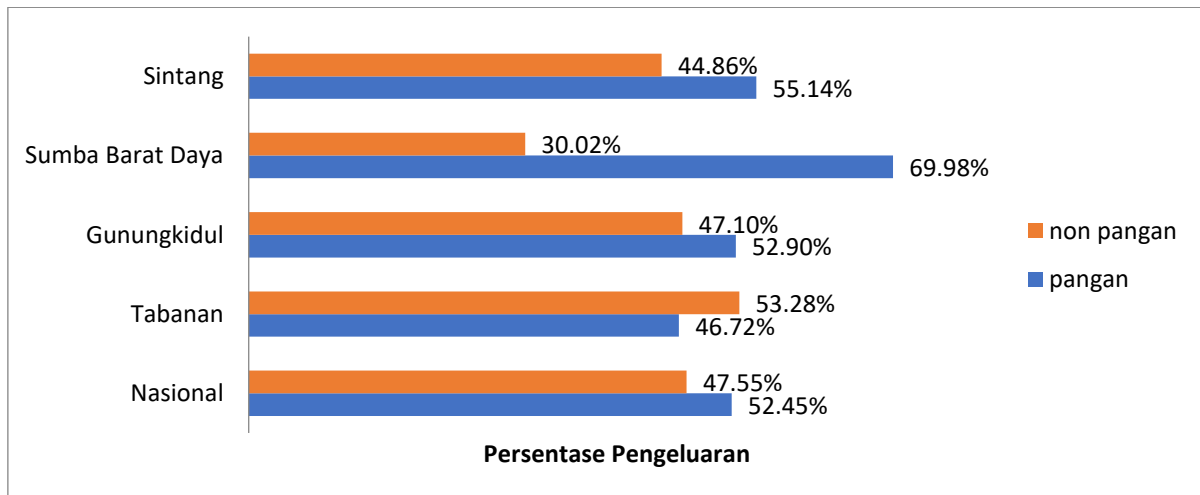
**Tabel 1. Rata-Rata Pengeluaran Rumah Tangga Responden Susenas 2017 (Rp/Bulan)**



Jenis Pengeluaran	Nasional	Tabanan	Gunungkidul	Sumba Barat Daya	Sintang
Pangan	1.974.889,59	1.987.126,49	1.512.448,47	1.788.123,28	1.808.336,12
Non Pangan	1.790.215,20	2.265.785,49	1.346.814,80	767.165,49	1.470.931,90
Total	3.765.104,79	4.252.911,98	2.859.263,27	2.555.288,77	3.279.268,02

Sumber: SUSENAS 2017 diolah (2019)

Berdasarkan Tabel 1 diatas maka dapat diketahui bahwa rata-rata pengeluaran rumah tangga terbesar adalah pada Kabupaten Tabanan dengan nilai Rp. 4.252.911,98 /bulan yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, sedangkan angka paling rendah ditempati oleh Kabupaten Sumba Barat Daya dengan nilai Rp. 2.555.288,77/bulan. Selain berdasarkan besaran nilai pengeluarannya komposisi pengeluaran rumah tangga juga dapat menjadi indikator kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran untuk bukan makanan. Hal ini dapat terjadi karena tingkat konsumsi makanan akan mencapai titik jenuh pada level tertentu sehingga jika pendapatan meningkat cenderung akan meningkatkan pengeluaran pada kebutuhan bukan makanan. Proporsi pengeluaran pangan dan non pangan pada lokasi penelitian dijelaskan melalui gambar berikut:



**Gambar 2. Proporsi Pengeluaran Rumah Tangga Tahun 2017**

Sumber: SUSENAS 2017 diolah (2019)

Berdasarkan Gambar 2 tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki tingkat kesejahteraan yang paling rendah dibandingkan Kabupaten lainnya dengan proporsi pengeluaran yang dialokasikan untuk kebutuhan pangan mencapai 69,98% dari total pengeluaran rumah tangga, sedangkan Kabupaten Tabanan merupakan daerah dengan tingkat kesejahteraan yang paling baik diukur dari proporsi pengeluaran yang dibelanjakan untuk kebutuhan non pangan yang lebih tinggi dibandingkan kebutuhan pangan yakni sebesar 53,28% dari total pengeluaran rumah tangga. Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah juga dapat dilihat dari



besaran nilai nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) , karena semakin tinggi nilai PDRB maka jumlah nilai tambah output dalam seluruh unit ekonomi pada suatu wilayah akan semakin tinggi (Kairupan, 2013). Dengan membandingkan besaran PDRB antar Kabupaten maka diketahui bahwa Tabanan memiliki aktifitas ekonomi yang paling tinggi dilihat dari nilai PDRB yang paling besar yakni 14.143 Milyar Rupiah/Tahun sedangkan Sumba Barat Daya memiliki nilai PDRB terendah yakni sebesar 2.101 Milyar Rupiah/Tahun, untuk Kabupaten Gunungkidul memiliki (BPS, 2018). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Tabanan memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan Gunungkidul, Sintang dan Sumba Barat Daya.

Selain berdasarkan pendapatan bukti empiris dari hasil penelitian Delgado dan Miles (1996) dan Ritonga (1994) menunjukkan bahwa terdapat faktor lainnya yang juga mempengaruhi pola konsumsi. Salah satu faktor tersebut adalah karakteristik rumah tangga. Karakteristik rumah tangga yang dimaksud disini dapat meliputi ciri-ciri demografis, kelas pendapatan, lokasi geografis, budaya, tingkat pendidikan, status sosial dan berbagai faktor lainnya yang melekat dalam suatu rumah tangga dan dianggap mempengaruhi keputusan konsumsi. Terkait dengan pola konsumsi ikan, kondisi Indonesia yang secara geografis memiliki tipologi berbeda-beda antar wilayah dengan keragaman budaya dan jenis ikan yang heterogen tentu menjadikan faktor karakteristik rumah tangga diduga dapat mempengaruhi tingkat konsumsi ikan. Oleh karena itu berbagai penelitian mengenai konsumsi ikan memasukkan variabel karakteristik rumah tangga dalam analisisnya, karakteristik rumah tangga pada penelitian ini dijelaskan melalui Tabel berikut:

**Tabel 2. Karakteristik Rumah Tangga Responden Susenas 2017**

Variabel	Nasional	Tabanan	Gunungkidul	Sumba Barat Daya	Sintang
Jumlah Rumah Tangga	297.276	640	758	520	630
Rata-Rata Jumlah Anggota Rumah Tangga (jiwa)	3.81	3.80	3.50	5.80	3.77
Rata-Rata Umur Kepala Keluarga (tahun)	48.39	50.45	55.66	48.09	45.34
Rata-Rata Lama Masa Sekolah Kepala Keluarga (tahun)	7.99	9.32	7.13	5.17	6.63
Persentase Rumah Tangga pada wilayah perkotaan (%)	27.4	43.75	21.11	7.69	12.22
Persentase rumah tangga sangat rawan dan rawan pangan (%)	26.9	16.88	3.27	31.54	45.08

Sumber: SUSENAS 2017 diolah (2019)

Berdasarkan Tabel 2 diatas maka dapat diketahui bahwa jumlah rumah tangga responden berdasarkan Data Susenas tahun 2017 sebanyak 297.276 rumah tangga pada 34 provinsi di seluruh Indonesia, sedangkan jumlah rumah tangga yang menjadi responden pada empat lokasi penelitian



sebesar 2.458 rumah tangga Karakteristik umum rumah tangga yang digambarkan dalam penelitian ini meliputi jumlah anggota rumah tangga, umur kepala keluarga, lama masa sekolah kepala rumah tangga, persentase rumah tangga pada wilayah perkotaan dan persentase rumah tangga sangat rawan dan rawan pangan. Secara umum rumah tangga di Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki jumlah anggota rumah tangga yang terbanyak dengan tingkat pendidikan kepala keluarga lebih rendah serta sebagian besar tinggal di wilayah perdesaan dengan rata-rata umur kepala keluarga yang lebih muda dibandingkan daerah lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pada Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki tingkat pendidikan lebih rendah dengan persentase penduduk yang rawan pangan cukup tinggi dibandingkan tiga Kabupaten lainnya. Sedangkan untuk Kabupaten Sintang ternyata memiliki persentase penduduk rawan pangan yang tertinggi, penduduk rawan pangan dalam penelitian ini dikategorikan berdasarkan besarnya AKG yang dikonsumsi per hari, dimana jika kurang dari 1800 kkal/kapita/hari dikategorikan rawan pangan.

Lokasi penelitian yang dipilih juga memiliki potensi untuk pengembangan industri perikanan yang diharapkan dapat menunjang ketersediaan ikan bagi pemenuhan kebutuhan penduduknya. Kabupaten Tabanan memiliki potensi perikanan tangkap karena memiliki wilayah pesisir meskipun masih didominasi oleh armada penangkapan yang berupa perahu motor tempel yang mencapai 51% , sedangkan potensi perikanan budidaya cukup besar dengan adanya pembenihan yang memproduksi cukup tinggi meskipun usaha pembesarannya belum cukup berkembang, selain itu potensi lainnya juga terlihat dari usaha pengolahan perikanan di Kabupaten Tabanan yang didominasi oleh pengolahan ikan pindang dengan kontribusi sebesar 90,2% dari total olahan perikanan (DKP Tabanan, 2018). Kondisi perikanan tangkap di Kabupaten Gunungkidul berbeda dengan Kabupaten Tabanan. Data Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul menunjukkan bahwa kabupaten Gunungkidul memiliki panjang pantai  $\pm 70$  km sehingga potensi perikanan tangkapnya lebih besar meskipun belum termanfaatkan secara optimal karena infrastruktur yang belum menunjang, sedangkan jika dilihat kondisi perikanan budidaya di Gunungkidul berkembang lebih baik dengan produk utama ikan lele, sedangkan untuk pengolahan perikanan produksi utamanya adalah abon tuna/lele. Data dari BPS tahun 2018 menunjukkan bahwa Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki potensi perikanan tangkap yang masih dapat dikembangkan karena belum termanfaatkan optimal karena hanya mengandalkan nelayan motor temple dan belum mempunyai kapal ukuran 5 GT keatas. Sedangkan berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang tahun 2017 memiliki potensi perikanan perairan umum daratan serta budidaya di keramba dan kolam karena dilewati oleh dua sungai besar yakni sungai Kapuas dan Melawi. Oleh karena itu keempat kabupaten dalam penelitian ini memiliki potensi untuk pengembangan produksi perikanan untuk meningkatkan ketersediaan ikan yang diharapkan dapat mendorong peningkatan konsumsi ikan di daerah tersebut.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### PARTISIPASI KONSUMSI PANGAN HEWANI

Pengukuran tingkat konsumsi selama ini banyak menggunakan ukuran kg/kapita/tahun yang menggambarkan besaran komoditas yang dikonsumsi sejumlah penduduk pada tahun tersebut. Namun pendekatan ini menjadi lebih efektif apabila didasarkan kepada cluster pengkonsumsinya karena angka pembagi dalam rata-rata konsumsi per kapita seharusnya menggunakan cluster yang mengkonsumsinya dan penduduk lain yang tidak mengkonsumsi bukan merupakan bagian dari pembagi. (Soedjana, 2013). Pendekatan partisipasi konsumsi dalam penelitian ini diukur sebagai sebuah sudut pandang baru dalam menentukan seberapa besar cluster konsumsinya sehingga dapat menggambarkan secara lebih tepat preferensi terhadap konsumsi pangan hewani dalam suatu wilayah tertentu.

Partisipasi konsumsi yang dihitung dalam penelitian ini diukur secara agregat dalam satu kabupaten dan juga dibagi berdasarkan kelas pendapatan yang dianggap dapat mempengaruhi keputusan konsumsi pangan hewani. Partisipasi konsumsi pangan hewani pada lokasi penelitian dijelaskan dalam Tabel berikut:

**Tabel 3. Partisipasi Konsumsi Pangan Hewani (%) pada Lokasi Penelitian**

Pangan Hewani	Nasional	Tabanan	Gunungkidul	Sumba Barat Daya	Sintang
Ikan	88.72	80.31	71.37	72.50	95.24
Daging	51.03	83.91	60.95	59.04	63.33
Telur	82.94	91.25	88.92	54.42	83.97
Susu	39.20	29.53	43.14	8.27	39.68

Sumber: SUSENAS 2017 diolah (2019)

Berdasarkan Tabel diatas maka dapat diketahui bahwa dilihat dari tingkat partisipasi konsumsi maka untuk Tabanan dan Gunungkidul lebih banyak rumah tangga yang mengkonsumsi telur dibandingkan ikan, daging dan susu. Sedangkan di Sintang dan Sumba Barat Daya ikan memiliki tingkat partisipasi konsumsi yang tertinggi, bahkan mencapai 95,24 di Sintang yang menunjukkan hampir semua rumah tangga di Sintang sudah mengkonsumsi ikan. Hal lain yang dapat dicermati adalah di Tabanan angka partisipasi konsumsi ikan lebih rendah dibandingkan daging, berdasarkan data dinas ketahanan pangan Kabuapten Tabanan dapat diketahui bahwa penduduk disana lebih menyukai makan daging terutama daging babi terkait dengan budaya dan kebiasaan makan masyarakat Bali. Angka partisipasi konsumsi daging nasional hanya sebesar 51,03 dimana pada empat yang menjadi fokus penelitian angka partisipasi konsumsi dagingnya lebih tinggi dibandingkan angka nasional. Hal ini menunjukkan secara umum penduduk pada empat lokasi





tersebut lebih menyukai daging dibandingkan rata-rata penduduk lainnya di seluruh Indonesia. Selain itu secara umum dapat disimpulkan bahwa terdapat kecenderungan ikan menjadi pilihan pada wilayah dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah sebagai sumber bahan pangan hewani yang terjangkau karena tingkat partisipasi tertinggi dibandingkan sumber pangan hewani lainnya pada Sumba Barat Daya dan Sintang.

Peningkatan konsumsi ikan masih potensial untuk terus diupayakan lebih optimal terutama pada Gunungkidul dengan angka partisipasi konsumsi yang terendah, disisi lain jumlah penduduk pada ini lebih tinggi dibandingkan ketiga lainnya. Oleh karena itu upaya peningkatan konsumsi ikan dapat dilakukan dengan perluasan partisipasi konsumsi ikan pada rumah tangga yang belum mengkonsumsi. Untuk lebih memperjelas analisis penelitian ini juga mengukur tingkat partisipasi konsumsi berdasarkan kelas pendapatan. Penelitian ini kemudian mengelompokkan lebih lanjut golongan pengeluaran rumah tangga menggunakan kriteria Bank Dunia. dimana penduduk digolongkan menjadi tiga kelas, yaitu 40 persen penduduk berpendapatan rendah, 40 persen penduduk berpendapatan sedang, dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Berdasarkan kriteria tersebut maka menggunakan data pengeluaran rumah tangga dalam Susenas tahun 2017 diperoleh range sebagai berikut

**Tabel 4. Kelas Pendapatan Rumah Tangga**

<b>Kelas Pendapatan</b>	<b>Jumlah rumah tangga</b>	<b>Range (Rp/bulan)</b>
Rendah	118.910	127.624 – 2.457.440
Menengah	118.911	2.457.452 – 5.074.536
Tinggi	59.455	5.074.544– 117.533.810

Sumber: SUSENAS 2017 diolah (2019)

Berdasarkan Tabel maka diketahui bahwa pendapatan terendah adalah sebesar Rp 127.624,-/bulan/rumah tangga dan pendapatan tertinggi adalah sebesar Rp 117.533.810/bulan/rumah tangga. Pembagian kelas tersebut diharapkan dapat menjelaskan dengan baik pola konsumsi sehingga kecenderungan pola konsumsi dan hubungannya dengan pendapatan dapat dianalisis secara lebih spesifik. Partisipasi konsumsi pangan hewani berdasarkan kelas pendapatan pada lokasi penelitian dijelaskan sebagai berikut:



**Tabel. 5. Partisipasi Konsumsi Pangan Hewani (%) berdasarkan kelas pendapatan**

Jenis	Tabanan			Gunungkidul			Sumba Barat Daya			Sintang		
	R	M	T	R	M	T	R	M	T	R	M	T
Ikan	72,2	82,9	83,3	64,7	80,8	80,7	68,27	75,5	96,8	92,81	97,2	96,7
Dagin	68,4	87,5	92,5	50,3	73,0	84,3	45,51	76,7	93,7	46,04	74,2	90,1
Telur	82,7	93,9	94,8	83,8	95,6	97,5	44,87	66,4	81,2	76,98	87,9	96,7
Susu	10,1	32,8	42,5	32,5	52,1	74,7	3,53	10,2	43,7	22,66	50,1	67,2

Sumber: SUSENAS 2017 diolah (2019)

Keterangan:

R = Rumah Tangga Kelas Pendapatan Rendah

M = Rumah Tangga Kelas Pendapatan Menengah

T = Rumah Tangga Kelas Pendapatan Tinggi

Berdasarkan Tabel 5 diatas maka dapat diketahui bahwa secara umum semakin tinggi kelas pendapatan maka semakin tinggi tingkat partisipasi konsumsi pangan hewani pada semua lokasi penelitian. Akan tetapi hal berbeda terjadi pada Kabupaten Sintang dimana tingkat partisipasi konsumsi ikan pada Kabupaten Sintang untuk rumah tangga dengan kelas pendapatan tinggi angkanya sedikit lebih rendah dibandingkan rumah tangga kelas menengah meskipun tingkat partisipasi konsumsinya relative tinggi yakni sebesar 96,72. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa jika terjadi peningkatan pendapatan pada rumah tangga di Kabupaten Sintang maka cenderung akan meningkatkan konsumsi pangan hewani selain ikan karena tingkat partisipasi konsumsi ikan didaerah ini sudah cukup tinggi.

Tingkat partisipasi konsumsi pangan hewani yang terendah pada semua lokasi penelitian adalah susu, dan hanya rumah tangga kelas pendapatan menengah dan tinggi pada Kabupaten Gunungkidul dan Sintang yang angka partisipasi konsumsinya lebih dari 50. Tingkat partisipasi konsumsi susu pada Kabupaten Sumba Barat Daya untuk kelas pendapatan rendah dan menengah sangat rendah hanya sebesar 3,53 dan 10,23, hal ini juga perlu menjadi perhatian pemerintah mengingat prevalensi stunting pada Kabupaten ini cukup tinggi yakni sebesar 61,22 (TNP2K, 2017). Partisipasi konsumsi tertinggi adalah telur untuk wilayah Tabanan dan Gunungkidul pada semua kelas pendapatan yang diduga karena telur lebih terjangkau baik dari sisi harga maupun ketersediaan jumlahnya untuk dapat diakses oleh semua kelas pendapatan rumah tangga. Sedangkan untuk di Kabupaten Sumba Barat Daya dan Sintang ikan merupakan pangan hewani utama yang tertinggi tingkat partisipasi konsumsinya,

Partisipasi konsumsi pada pangan hewani dihubungkan dengan kelas pendapatan sangat berkaitan dimana semakin tinggi kelas pendapatan maka semakin tinggi pula angka partisipasi



konsumsinya. Berdasarkan Tabel 5 maka dapat diketahui bahwa perbedaan tingkat partisipasi konsumsi pada kelompok rumah tangga kaya dan miskin pada seluruh Kabupaten cukup signifikan terutama pada kelompok pangan hewani daging dan susu. Hal ini diduga disebabkan tidak semua rumah tangga mampu mengkonsumsi jenis pangan ini karena rendahnya daya beli. Menurut Soedjana (2013) tingkat partisipasi konsumsi daging sapi yang rendah pada periode 2008-2014 merupakan sebuah respon dari aspek budaya dan daya beli rumah tangga, sedangkan untuk komoditas susu termasuk pangan hewani yang secara rata-rata nasional tingkat partisipasi dan konsumsinya masih rendah yang menurut Ariani *et al.* (2018) disebabkan faktor sosial ekonomi dan harga susu yang relatif mahal. Hal ini berbeda dengan tingkat partisipasi konsumsi telur dan ikan yang hampir merata pada semua kelas pendapatan sehingga dapat disimpulkan bahwa telur dan ikan merupakan sumber protein hewani utama yang terjangkau oleh seluruh rumah tangga di Indonesia pada semua kelas pendapatan.

## **KESIMPULAN**

Pengukuran kinerja konsumsi komoditas pangan hewani diantaranya ikan, daging, telur dan susu lebih sesuai bila menggunakan tingkat partisipasi konsumsi untuk menunjukkan besaran kluster konsumen dari komoditas tersebut. Tingkat partisipasi konsumsi ini dianggap dapat melengkapi perhitungan tingkat konsumsi per kapita per tahun komoditas pangan yang selama ini menjadi indikator utama pengukuran konsumsi penduduk. Hasil perhitungan tingkat partisipasi konsumsi dapat menggambarkan preferensi rumah tangga dalam wilayah atau cluster tertentu, pada penelitian ini dijawab melalui perhitungan tingkat partisipasi konsumsi pangan hewani pada empat kabupaten dan dianalisis lebih lanjut pada setiap kelas pendapatan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pada daerah rendah konsumsi ikan yang dipilih dalam penelitian ini ternyata telur merupakan komoditas dengan tingkat partisipasi konsumsi tertinggi untuk Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Gunung Kidul. Sedangkan pada Kabupaten Sumba Barat Daya dan Kabupaten Sintang tingkat partisipasi konsumsi ikan tertinggi dibandingkan pangan hewani lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pada Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Gunung Kidul ikan bukan merupakan preferensi utama yang dipilih sebagai sumber protein hewani, akan tetapi pada Kabupaten Sumba Barat Daya ikan merupakan pilihan utama meskipun jika dilihat dari tingkat konsumsi ikan per kapitanya masih rendah akan tetapi lebih banyak rumah tangga yang mengkonsumsinya dibandingkan komoditas lainnya. Hal sama juga ditemui di Kabupaten Sintang dimana tingkat konsumsi ikan per kapitanya sudah relatif tinggi dibandingkan tiga kabupaten lainnya dalam penelitian ini dengan tingkat partisipasi konsumsi yang sangat tinggi, akan tetapi potensi peningkatan konsumsi ikan di daerah ini masih terbuka karena jika dibandingkan Kabupaten lainnya di provinsi Kalimantan Barat maka angka konsumsi ikan di Sintang nilainya paling rendah. Sehingga



dapat disimpulkan bahwa ikan menjadi pilihan utama pada wilayah dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah jika mengacu pada komposisi pengeluaran rumah tangga dan besaran PDRB pada lokasi penelitian.

Partisipasi konsumsi dapat menjadi pelengkap informasi dalam penentuan kebijakan peningkatan konsumsi ikan oleh Pemerintah. Kabupaten Gunungkidul dengan jumlah penduduk yang lebih banyak daripada tiga kabupaten lainnya diharapkan dapat diperluas tingkat partisipasi konsumsinya dengan promosi dan edukasi sampai ke daerah pegunungan sehingga jumlah rumah tangga yang mengkonsumsi ikan semakin meningkat. Sedangkan pada Kabupaten Tabanan peningkatan konsumsi ikan dapat dilakukan dengan meningkatkan keterjangkauan produk ikan olahan yang selama ini cukup disukai oleh penduduk. Kabupaten Sumba Barat Daya dengan kondisi yang cukup tertinggal dilihat dari PDRB dan rata-rata pengeluaran rumah tangga membutuhkan program yang lebih intensif dalam meningkatkan daya beli masyarakat terhadap sumber pangan hewani seperti dengan program subsidi dari pemerintah. Program peningkatan konsumsi ikan pada Kabupaten Sintang dapat difokuskan pada peningkatan jumlah ikan yang dikonsumsi pada setiap rumah tangga karena tingkat partisipasi ikan sudah tergolong tinggi, sehingga peningkatan konsumsi dapat dilakukan dengan meningkatkan supply ikan dan harga beli ikan supaya lebih terjangkau bagi masyarakat di seluruh wilayah kabupaten Sintang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, M., A. Suryana, S.H. Suhartini, dan H.P. Saliem. 2018. Keragaan Konsumsi Pangan Hewani Berdasarkan Wilayah dan Pendapatan di Tingkat Rumah Tangga. *Analisis Kebijakan Pertanian* 16(2): 147 – 163
- Aridiyah FO, N Rohmawati dan M Ririanty. 2015. Faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian stunting pada anak balita di wilayah pedesaan dan perkotaan. *Jurnal Kesehatan* 3(1): 163 – 170. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JPK/article/view/2520/2029>.
- [BKP]. Badan Ketahanan Pangan. 2018. *Direktori Perkembangan Konsumsi Pangan*. Kementerian Pertanian. Jakarta.
- [BPS]. Badan Pusat Statistik. 2017. *Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2017*. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- [BPS]. Badan Pusat Statistik. 2018. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2013-2017*. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- [BPS]. Badan Pusat Statistik. 2017. *Statistik Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya 2017*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat Daya. Tambolaka.
- Delgado MA. Miles D. 1996. *Household Characteristics and Consumption Behaviour: Non Parametric Approach* [Working Paper]. Statistics and Econometric Series. Getafe (Spanyol): Universidad Carlos III de Madrid.



- [DKP] Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul. 2017. *Laporan Tahunan 2017*. Gunungkidul.
- [DKP] Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tabanan. 2017. *Laporan Tahunan 2017*. Gunungkidul.
- [DKP] Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang. *Laporan Tahunan 2017*. Sintang.
- Hariyadi, P. 2015. Peranan Pangan Hewani dalam Pembangunan SDM Bangsa. Expert Opinion. *Umami Indonesia* 4(3): 12 – 15
- [Kemenkes]. Kementerian Kesehatan. 2017. *Hasil pemantauan status gizi (PSG) tahun 2016*. Jakarta.
- Kairupan, S., P. (2013). Produk Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb), Inflasi Dan Belanja Daerah Pengaruhnya Terhadap Kesempatan Kerja Di Sulawesi Utara Tahun 2000-2012. *Jurnal EMBA* 1(4): 2206 – 2216
- Khomsan, A. 2010. *Pangan dan Gizi untuk Kesehatan*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Murdiati, A. dan Amaliah. 2013. *Panduan Penyiapan Pangan Sehat Untuk Semua. Edisi II*. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta.
- Mitra. (2015). Permasalahan anak pendek (stunting) dan intervensi untuk mencegah terjadinya stunting (Suatu Kajian Kepustakaan). *J. Kesehatan Komunitas* 2(6): 254 – 261
- Ritonga H. 1994. *The Impact of Household Characteristics on Household Consumption Behavior: a Demand System Analysis on The Consumption Behavior of Urban Households in The Province of Central Java. Indonesia*. Iowa State University
- [TNP2K] Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2017. *100 Kabupaten/Kota Prioritas untuk Intervensi Anak Kerdil (Stunting)*. Sekretariat Wakil Presiden RI. Jakarta.
- Sari EM, M Juffrie, N Nurani, MN Sitaresmi. 2016. Asupan protein, kalsium dan fosfor pada anak stunting dan tidak stunting usia 24-59 bulan. *Jurnal Gizi Klinik Indonesia* 12(4): 152 – 259
- Soedjana, T., D. 2013. Partisipasi Konsumsi sebagai Alat Ukur Status Ketahanan Pangan Daging. *Wartazoa* 23(4): 165 – 175. [http://medpub.litbang.pertanian.go.id > index.php > wartazoa > article > download](http://medpub.litbang.pertanian.go.id/index.php/wartazoa/article/download).
- Umata M, West CE, Verhoef H, Haidar J, Hautvast J. 2003. Factors associated with stunting in infants aged 5–11 months in the dodota-sire district, rural Ethiopia. *J.Nutrition* 133(4): 1064 – 1069
- Wellina WF, MI Kartasurya, MZ Rahfilludin. 2016. Faktor risiko stunting pada anak umur 12-24 bulan. *Jurnal Gizi Indonesia* 5(1): 55 – 61